

Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI sering terjadipertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang seharusnya terdakwa memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya yang masih kecil serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI yang mengakibatkan istri dan anak terdakwa tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak serta anak terdakwa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari terdakwa selaku orang tuanya. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi SRI WAHYUNI dilaporkan ke Polres Pasuruan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 49 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan mengajukan keberatan/jawaban atau eksepsi. Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-

7. Bahwa terdakwa mengancam saksi akan ribut di jalan dan akan menabrak saksi apabila saksi tidak mau ikut terdakwa naik motor dan kemudian dengan terpaksa saksi ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa;
8. Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah Purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayaninya;
9. Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;
10. Bahwa setelah itu terdakwa juga mengambil tas milik saksi yang menurut perkiraan terdakwa di dalam tas saksi tersebut ada guna- guna dari dukun;
11. Bahwa saksi selama menikah dengan terdakwa hanya diberi nafkah uang Rp.50.000,- per bulan, dan terdakwa tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan;
2. Terdakwa dengan saksi juga telah pisah ranjang sejak tanggal 7 Januari 2011 dikarenakan pertengkaran terus-menerus akibat saksi korban sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa karena tidak diberi nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
3. Bahwa selama pernikahan terdakwa per bulannya memberi nafkah istrinya kurang lebih Rp.50.000 s/d Rp 100,000,- per bulannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
4. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;
5. Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;
6. Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah Purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar,

motornya dan mengajak saksi korban untuk melayani terdakwa melakukan hubungan suami- isteri.

Berdasarkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni di persidangan, pada saat saksi korban diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa merasa keberatan dan sempat menolaknya karena saksi korban merasa tidak pada tempatnya untuk melakukan persetubuhan di tempat yang tidak layak seperti di TKP tersebut.

Karena saksi korban menolak diajak berhubungan badan, membuat terdakwa marah dan kemudian langsung menyeret saksi korban dari motor untuk duduk di tanah dan mendorong bahu saksi korban untuk direbahkan di tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang yang dipakai oleh saksi korban dengan paksa, setelah terlepas kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban selama kurang lebih 5 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa juga merampas tas milik saksi terus saksi diantarkan pulang sampai di Desa sengon agung kecamatan Purwosari, dan saksi kemudian pulang sendirian ke

dimaksud dalam Pasal 46 merupakan delik aduan, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa Surat.

Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Korban Sri Wahyuni tentang pencabutan pengaduan tersebut (tertanggal 19 Agustus 2011) dibuat pada saat saksi korban masih mengalami trauma berat dan merasa tertekan oleh terdakwa, hal tersebut terbukti dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban Sri Wahyuni yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Saksi korban (Sri Wahyuni) memohon agar terdakwa dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;
- b. Saksi korban sudah tidak mencintai lagi terdakwa, terbukti saat ini saksi sedang mengajukan proses cerai terhadap terdakwa di Pengadilan agama Pasuruan (copy gugatan terlampir);
- c. Meskipun saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi saksi korban tetap menuntut keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi

uang belanja/uang bulanan kepada dirinya kurang lebih sebesar Rp.50,000,-, terkadang untuk membeli susu anaknya yang masih kecil saksi sri Wahyuni kerap kali meminta uang kepada orang tuanya, hal tersebut ditambah lagi terdakwa seringkali pulang larut malam ke rumah sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa.

Pada awal bulan Januari 2011 saksi korban Sri Wahyuni bersama dengan anaknya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa, dan memutuskan kembali kepada saksi Rosihan Anwar (orang tuanya) karena merasa tidak diberi nafkah yang layak dan kurang perhatian dari terdakwa, dan selama kurun waktu saksi pisah ranjang dan pisah rumah tersebut terdakwa juga tidak berusaha memperbaiki kesalahan dan berupaya memenuhi nafkah kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

Selama saksi korban tinggal di rumah orang tuanya yang memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi korban bersama anaknya adalah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar dan terdakwa jarang menemuinya untuk memberi uang belanja atau nafkah lahiriah. Maka unsur dalam dakwaan kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang maksud dari pembuat Undang-Undang membentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bahwa dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, selain bertujuan untuk menindak pelaku juga

rumah tangga, sehingga pemidanaan tidak berakibat memungkinkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dengan perbuatan terdakwa karena sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2001 yang berbunyi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus setimpal dengan perbuatannya. Penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya.

Karena itulah Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatannya. Selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

